

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program kebijakan *e*-Pajak daerah Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung belum optimal. Kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang program *e*-Pajak Daerah Bumi dan Bangunan, SDM aparatur pelaksana yang kurang memadai, serta kurangnya pemahaman pelaksana kebijakan *e*-Pajak daerah Bumi dan Bangunan yang harus dilaksanakan, merupakan bukti dari pelaksanaan program *e*-Pajak Daerah Bumi dan Bangunan di BPPD Kota Bandung yang belum optimal. Pada aspek lainnya dukungan yang maksimal dari Pemerintah Kota Bandung terkait anggaran atau insentif dirasakan masih belum memadai, sedangkan pada aspek struktur birokrasi, terlihat dari kurang adanya kerjasama dari berbagai pihak yang seharusnya terlibat dalam kebijakan menyebabkan ketidak efektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan Penerapan Kebijakan *e*-Pajak Daerah Bumi dan Bangunan di Badan Pengelolan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Optimalisasi Kebijakan *e*-Pajak Daerah Bumi dan Bangunan di Kota Bandung antara lain:

- a. Faktor Pendukung
  - a) Adanya Kerjasama Pemda dan Pihak Swasta.
  - b) Sumberdaya yang memadai.
  - c) Sarana dan prasarana.
  - d) Anggaran.
- b. Faktor Penghambat :
  - a) Kurangnya sosialisasi kerarah Modernisasi
  - b) Kurangnya Kerjasama antara unit.
  - c) Kurangnya konsistensi dari aparat pelaksana.
  - d) Ketidaktahuan Masyarakat Dalam Transaksi Online.
  - e) Kondisi dan prubahan sosial Masyarakat.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung tentang *e*-Pajak Bumi dan Bangunan yaitu dengan memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat Kota Bandung seperti mengadakan event acara sepeda santai, jalan sehat sekaligus mensosialisasikan Aplikasi Pembayaran *e*-Pajak Bumi dan Bangunan (SIPP) yang bisa masyarakat akses secara langsung dan bisa melihat seputar informasi Wajib Pajak dengan mengikuti panduan yang ada serta menggandeng pihak swassta dan BANK Daerah sebagai mitra bayar bekerjasama mensosialisasikan/informasi tentang kebijakan Pemerintah Kota Bandung.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan untuk hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan mengenai Implementasi Kebijakan *e*-Pajak Daerah Bumi dan Bangunan sebagai berikut :

### 5.2.1 Saran Akademis

Untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih dalam bagi pengembangan keilmuan, disarankan pada peneliti lain untuk melakukan kajian dengan pendekatan implementasi dari berbagai teori kebijakan partisipatif.

### 5.2.2 Saran Praktis

Dari Hasil Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan *e*- Pajak Daerah Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung, Peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu :

1. Disarankan Kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung menyampaikan Sosialisasi tentang *e*- Pajak PBB oleh tim IT *e*-Pajak Bumi dan Bangunan kepada seluruh masyarakat Kota Bandung semaksimal mungkin, agar masyarakat pun lebih memahami *e*-Pajak PBB dan mampu berkontribusi agar program kebijakan tersebut optimal.
2. Disarankan Kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung lebih Meningkatkan SDM pelaksana dan sarana prasarana agar masyarakat berpartisipasi ada dalam program *e*-Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Disarankan Kepada Aparatur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dan Tim IT Pajak Bumi dan Bangunan selayaknya lebih kreatif dan inovatif agar masyarakat tertarik dan ikut serta dalam program *e-Pajak Daerah Bumi dan bangunan*
4. Disarankan Kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Meningkatkan kesungguhan aparaturnya pelaksana kebijakan *e-Pajak Daerah Bumi dan Bangunan* dan Pemerintah Pusat /Pemerintah Daerah untuk terus memantau Pajak Daerah sehingga tidak terjadi kesalahan atau *miscommunication*.